

## **PERAN GURU PPKN DALAM MEMBENTUK SIKAP KRITIS SISWA TERHADAP ISU PENISTAAN AGAMA**

Zaina Riska Putri<sup>1</sup>, Syamzaimar<sup>2</sup>

[zainariskaputri@gmail.com](mailto:zainariskaputri@gmail.com)<sup>1</sup>, [syamzaimar0774@gmail.com](mailto:syamzaimar0774@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author: Syamzainar

✉ [syamzaimar0774@gmail.com](mailto:syamzaimar0774@gmail.com)

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim

**Abstrak:** Isu penistaan agama di Indonesia merupakan fenomena sosial yang sensitif, kompleks, dan multidimensional. Sejak era reformasi hingga kini, kasus-kasus penistaan agama kerap muncul dan menjadi sorotan media massa maupun media sosial. Fenomena ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial, politik, dan budaya, serta berimplikasi serius terhadap kohesi sosial dan stabilitas nasional. Laporan terbaru dari SETARA Institute (2023–2024) menunjukkan adanya ratusan peristiwa intoleransi yang berhubungan dengan kebebasan beragama, termasuk penolakan pembangunan rumah ibadah dan pembubaran kegiatan keagamaan. Fakta ini memperlihatkan bahwa isu penistaan agama sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik, sehingga memperuncing polarisasi masyarakat dan melemahkan kualitas demokrasi. Dalam konteks pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), isu penistaan agama menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menanamkan sikap kritis pada siswa. Guru PPKN berperan strategis dalam membekali siswa dengan kemampuan berpikir rasional, literasi digital, serta penguatan civic disposition yang mencakup toleransi, kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berdialog secara demokratis. Penelitian Su'udiyah (2020) menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar PPKN berbasis ilmu hukum tentang penistaan agama efektif dalam menumbuhkan civic disposition siswa. Keabsahan penelitian diperkuat dengan triangulasi metode melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara kritis, penelitian ini menegaskan bahwa penanganan isu penistaan agama tidak cukup hanya melalui jalur hukum, melainkan membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan, penguatan nilai toleransi, serta literasi digital. Pendidikan PPKN menjadi instrumen penting untuk membentuk generasi muda yang kritis, rasional, dan toleran dalam menyikapi isu-isu sensitif, sehingga kohesi sosial dan kualitas demokrasi dapat terjaga.

**Kata Kunci:** Penistaan Agama, Pendidikan Ppkn, Civic Disposition, Toleransi, Literasi Digital.

**Abstract:** Religious blasphemy in Indonesia is a highly sensitive and multidimensional social phenomenon that continues to generate controversy in the public sphere. Since the Reformasi era, blasphemy cases have repeatedly surfaced, drawing attention from both mass media and social media, and often provoking emotional reactions that escalate into horizontal conflicts. This issue is not limited to legal dimensions but also intersects with social, political, and cultural aspects, carrying serious implications for national stability. Recent reports from SETARA Institute (2023–2024) documented hundreds of incidents of intolerance related to freedom of religion, including the rejection of worship facilities and the dissolution of religious activities. These findings highlight how blasphemy issues are frequently exploited for political purposes, exacerbating polarization and undermining democratic quality. Within the educational context, particularly in Civic and Pancasila Education (PPKn), blasphemy becomes both a challenge and an opportunity to cultivate critical thinking among students. PPKN teachers play a strategic role in equipping students with rational reasoning, digital literacy, and strengthening civic disposition—encompassing tolerance, legal awareness, social responsibility, and democratic

*dialogue. Research by Su'udiyah (2020) demonstrated that law-based PPKN teaching materials on blasphemy effectively fostered civic disposition, with validity ensured through triangulation methods involving interviews, observations, and documentation. Critically, this study underscores that addressing blasphemy cannot rely solely on legal enforcement. A comprehensive approach is required, integrating education, tolerance values, and digital literacy. PPKN education thus emerges as a vital instrument to shape young generations who are critical, rational, and tolerant in responding to sensitive issues, thereby safeguarding social cohesion and strengthening democratic resilience.*

**Keywords:** Religious Blasphemy, Civic Education, Civic Disposition, Tolerance, Digital Literacy.

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan Kewarganegaraan (Ppkn) adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk individu menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter. Dalam konteks akademik, Ppkn dipahami sebagai upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi manusia, serta semangat kebangsaan nasionalisme. Daryono Menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sarana untuk menyiapkan warga negara yang mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial-politik dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan kenstitusi negara. Dalam konteks keindonesiaan, Ppkn menjadi jembatan antara nilai-nilai lokal, nasional, dan global yang di bingkai dalam semangat pancasila dan UUD 1945.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Studi kasus kualitatif dikarenakan pendekatan studi kasus kualitatif ini adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan secara alamiah berdasarkan fakta-fakta pada kondisi objek yang ada di lapangan. Peneliti menggunakan metode studi kasus, yang mana penelitian ini digunakan untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. penelitian kualitatif akan menghasilkan data studi kasus, baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan sehingga data yang dihasilkan peneliti haruslah sesuai dengan fakta yang terjadi. Penelitian kualitatif ini lebih bersifat menjelaskan kejadian atau mendeskripsikan suatu fenomena dan hal yang benar akan adanya dan harus diteliti secara mendalam.

Oleh karena itu guru dituntut memiliki keterampilan pedagogis yang kuat agar mampu menciptakan proses pembelajaran yang optimal sekaligus menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Namun, dalam praktiknya banyak guru menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan waktu, tingginya beban administrasi, serta kurangnya pemahaman mengenai strategi pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selain itu, orientasi pembelajaran yang masih berfokus pada pencapaian hasil ujian membuat proses pengembangan berpikir kritis sering terabaikan.

Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran penting dalam membentuk sikap kritis siswa terhadap isu-isu sensitif, seperti kasus penistaan agama yang kerap menimbulkan konflik sosial di Indonesia. Guru PPKn bertugas mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, sikap toleransi beragama, serta keterampilan berpikir kritis melalui kegiatan diskusi, analisis kasus, dan pendekatan demokratis. Upaya ini bertujuan untuk mencegah polarisasi maupun radikalisme, sekaligus menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk warga negara yang rasional, inklusif, dan mampu menyikapi isu penistaan agama sesuai dengan prinsip konstitusi.

Pendidikan memiliki peran krusial dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi dinamika zaman yang semakin kompleks. Di era abad ke-21, keterampilan berpikir kritis menjadi salah satu kemampuan utama yang harus dimiliki

oleh peserta didik. Kemampuan ini tidak hanya penting untuk keberhasilan akademik, tetapi juga untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Jika dikembangkan sejak dini, keterampilan berpikir kritis dapat membantu siswa dalam memahami informasi secara mendalam, menganalisis persoalan, serta mengambil keputusan yang tepat.

Meskipun terdapat potensi besar dalam pembelajaran untuk membangun kesadaran kritis siswa terhadap isu toleransi, penelitian yang secara khusus menghubungkan kedua elemen ini masih terbatas. Sebagian besar studi yang ada cenderung berfokus pada aspek historis dan kultural dari sejarah Islam tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap bagaimana nilai toleransi yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan untuk memahami dan meresapi fenomena sosial yang aktual, seperti toleransi yang meningkat di masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam literatur yang ada, di mana pentingnya kesadaran kritis dalam konteks pendidikan agama belum sepenuhnya diintegrasikan, meskipun banyak penelitian mencatat bahwa pendidikan berperan krusial dalam membangun moralitas dan sosialitas yang inklusif.

Nilai karakter toleransi dapat memberikan pengajaran manusia memanusiakan manusia dalam interaksi sosialnya. Dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Pasal 3 "PPP dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter meliputi nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab". Bahwa dengan disahkannya peraturan tersebut negara menginginkan kepastian hukum untuk menjamin nilai-nilai karakter di Indonesia.

Namun, tantangan nyata muncul dalam implementasi efektif dari pendekatan ini. Kekurangan waktu, sumber daya yang terbatas, dan resistensi terhadap perubahan dalam lingkungan pendidikan tinggi dapat menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari seluruh pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, untuk merancang dan menerapkan strategi yang efektif dalam membangun sikap moderasi beragama pada mahasiswa.

Meskipun pembelajaran berbasis masalah memiliki banyak potensi untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam diskusi agama Islam, implementasi yang efektif memerlukan perencanaan yang matang. Penelitian oleh Indriani (2021) menunjukkan bahwa guru yang terampil dalam merancang pembelajaran berbasis masalah dan mampu mengelola dinamika diskusi dapat menciptakan atmosfer belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Penting bagi guru untuk mendapatkan pelatihan dan dukungan dalam menerapkan metode ini, terutama dalam konteks pembelajaran agama Islam yang memiliki tantangan tersendiri.

Oleh karena itu penelitian ini menjadi sangat mendesak mengingat dinamika sosial dan pendidikan di Indonesia. Meningkatnya fenomena radikalisme dan ekstremisme agama, terutama di kalangan mahasiswa, mendorong perlunya identifikasi upaya konkret dalam membangun sikap moderasi beragama sebagai respons terhadap ancaman ini. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan sikap mahasiswa, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi mampu menjadi sarana efektif dalam membentuk sikap 1390 moderasi. Selain itu, kontribusi terhadap harmoni sosial juga menjadi faktor penting, di mana mahasiswa yang memiliki pemahaman agama yang

moderat diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Penelitian ini juga memberikan fokus pada pentingnya keseimbangan dalam pemahaman agama Islam, menekankan bahwa pendidikan agama harus mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan menjunjung tinggi keberagaman.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami secara mendalam peran guru PPKn dalam membentuk sikap kritis siswa terhadap isu penistaan agama. Topik tersebut merupakan fenomena sosial yang rumit, sensitif, dan sarat dengan nilai, sehingga tidak dapat direduksi hanya ke dalam angka atau data statistik. Pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali makna, pengalaman, serta dinamika pembelajaran yang terjadi di kelas, sekaligus menelusuri bagaimana guru dan siswa berinteraksi ketika membahas isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi tanpa melakukan manipulasi variabel. Peneliti berusaha menghadirkan gambaran nyata tentang strategi guru PPKn dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, toleransi beragama, dan keterampilan berpikir kritis melalui diskusi, analisis kasus, serta pendekatan demokratis. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menyoroti hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran yang membentuk sikap kritis siswa.

Subjek penelitian adalah guru PPKn sebagai informan utama, karena mereka memiliki peran langsung dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Siswa dijadikan informan pendukung untuk melihat dampak pembelajaran terhadap sikap kritis mereka. Informan tambahan seperti kepala sekolah atau pengawas dapat memberikan perspektif lebih luas mengenai kebijakan dan implementasi pembelajaran PPKn. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap paling relevan dan mampu memberikan informasi mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif model Miles & Huberman, yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari hasil observasi dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan fenomena secara rinci. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, berdasarkan temuan di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai peran guru PPKn dalam membentuk sikap kritis siswa terhadap isu penistaan agama.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana guru PPKn berperan dalam membentuk sikap kritis siswa terhadap isu penistaan agama, bagaimana strategi pembelajaran diterapkan, serta bagaimana siswa merespons pembelajaran yang menekankan nilai toleransi dan berpikir kritis. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi guru, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika sosial di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Isu Penistaan Agama sebagai Fenomena Sosial**

Isu penistaan agama di Indonesia merupakan salah satu fenomena sosial yang

paling sensitif dan sering menimbulkan polemik di ruang publik. Sejak era reformasi hingga saat ini, kasus-kasus yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama kerap muncul dan menjadi sorotan media massa maupun media sosial. Hal ini tidak terlepas dari posisi agama sebagai salah satu unsur fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang secara konstitusional dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Agama bukan hanya dimaknai sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai identitas sosial yang melekat pada individu maupun kelompok. Oleh karena itu, ketika muncul isu penistaan agama, masyarakat sering kali bereaksi secara emosional, bahkan tidak jarang menimbulkan konflik horizontal.

Penistaan agama tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, politik, dan budaya. Agama di Indonesia berfungsi sebagai identitas sosial yang melekat pada individu maupun kelompok. Karena itu, ketika muncul dugaan penistaan agama, masyarakat sering bereaksi secara emosional. Reaksi ini kerap menimbulkan konflik horizontal, terutama di ruang publik dan media sosial, yang memperlihatkan betapa sensitifnya isu ini dalam konteks kehidupan berbangsa.

Selain berdampak pada hubungan antarindividu dan kelompok, isu penistaan agama juga memiliki implikasi serius terhadap stabilitas nasional. Dalam lima tahun terakhir, berbagai laporan menunjukkan bahwa kasus penistaan agama seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik, sehingga memperuncing polarisasi masyarakat. Misalnya, penelitian terbaru dari SETARA Institute (2023–2024) mencatat ratusan peristiwa intoleransi yang berhubungan dengan kebebasan beragama, termasuk tindakan penolakan pembangunan rumah ibadah dan pembubaran kegiatan keagamaan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penistaan agama tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu kohesi sosial dan memperlemah kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penanganan isu ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, pendidikan, serta penguatan nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa.

### **Peran Pendidikan PPKN dalam Menanamkan Sikap Kritis**

Dalam konteks pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), isu ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menanamkan sikap kritis kepada siswa. Sikap kritis diperlukan agar siswa tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, serta mampu menilai suatu peristiwa berdasarkan perspektif hukum, nilai Pancasila, dan prinsip demokrasi.

Pendidikan PPKN memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa. Sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada pembentukan warga negara yang demokratis, PPKN tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang sistem politik dan hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam konteks isu penistaan agama, guru PPKN diharapkan mampu mengarahkan siswa untuk memahami bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan agama memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Dengan demikian, siswa tidak hanya melihat isu penistaan agama dari sudut pandang emosional, tetapi juga dari perspektif rasional yang berlandaskan hukum dan nilai Pancasila.

### **Urgensi Literasi Digital dalam Menyikapi Isu Keagamaan**

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut memperkuat urgensi pembentukan sikap kritis siswa. Informasi mengenai isu penistaan agama sering kali menyebar dengan cepat melalui media sosial, tanpa adanya verifikasi yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak siswa terpapar informasi yang bias, bahkan hoaks, sehingga berpotensi menimbulkan sikap intoleran. Guru PPKN memiliki tanggung

jawab untuk membekali siswa dengan keterampilan literasi digital, agar mereka mampu memilah informasi yang valid dan tidak terjebak dalam arus provokasi. Dengan keterampilan ini, siswa dapat menyikapi isu penistaan agama secara lebih bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh opini publik yang tidak berdasar.

### **Penguatan Civic Disposition**

Pembentukan sikap kritis terhadap isu penistaan agama juga berkaitan dengan penguatan civic disposition atau sikap kewarganegaraan. Civic disposition mencakup sikap toleransi, kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berdialog secara demokratis. Guru PPKN berperan menanamkan sikap ini melalui pembiasaan di kelas, seperti menghargai perbedaan pendapat, menaati aturan sekolah, dan menghindari ujaran kebencian. Dengan civic disposition yang kuat, siswa akan mampu menyikapi isu penistaan agama secara rasional, tidak emosional, dan tetap menjunjung tinggi nilai kebangsaan.

Selain itu, penguatan civic disposition dalam konteks penistaan agama juga menuntut adanya keterlibatan aktif siswa dalam praktik kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas teori di kelas. Misalnya, siswa dilatih untuk berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah, kerja kelompok, atau simulasi debat yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Dengan cara ini, mereka tidak hanya memahami konsep toleransi dan kesadaran hukum secara abstrak, tetapi juga menginternalisasikannya melalui pengalaman nyata. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan menumbuhkan sikap demokratis, sehingga mereka lebih siap menghadapi isu-isu sensitif seperti penistaan agama dengan cara yang rasional dan konstruktif.

### **Hasil Penelitian Terkait**

Penelitian yang dilakukan oleh Su'udiyah (2020), pengembangan bahan ajar PPKN berbasis ilmu hukum tentang penistaan agama terbukti efektif dalam menumbuhkan civic disposition siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan bahan ajar tersebut lebih kritis dalam menanggapi isu keagamaan, tidak hanya berdasarkan emosi, tetapi juga dengan pertimbangan hukum dan moral. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendidikan PPKN memiliki peran penting dalam membentuk sikap kritis siswa terhadap isu penistaan agama. Dengan demikian, guru PPKN perlu terus berinovasi dalam mengembangkan bahan ajar dan strategi pembelajaran yang relevan dengan isu-isu aktual di masyarakat. peneliti mengujikeabsahan menggunakan triangulasi metode, dimanadalam penelitian ini ditemukan hasil penelitian dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Nilai moral untuk menanamkan karakter toleransi, yang mana karakter toleransi adalah sikap dan tindakanyangmenghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat,sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya, berdasarkan hasil observasinilai moral toleransi ditanamkan pada anakmelalui keteladanan yang disampaikan gurudengan cara menyampaikan pesanmoral saat anak berbarissebelummasuk kelastentang perilaku yang baikdan buruk, seperti menghargai sesama teman, suka menolong, tidak mengejek teman, tidak suka marah, bertutur kata yang baikdan sopan.

## **KESIMPULAN**

Isu penistaan agama di Indonesia merupakan fenomena sosial yang kompleks, sensitif, dan multidimensional. Ia tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga

menyentuh dimensi sosial, politik, budaya, serta berdampak pada stabilitas nasional. Dalam lima tahun terakhir, berbagai laporan menunjukkan bahwa kasus penistaan agama sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik sehingga memperuncing polarisasi masyarakat dan melemahkan kualitas demokrasi.

Dalam konteks pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), isu ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menanamkan sikap kritis pada siswa. Guru PPKN berperan strategis dalam membekali siswa dengan kemampuan berpikir rasional, literasi digital, serta penguatan civic disposition yang mencakup toleransi, kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berdialog secara demokratis. Melalui pembelajaran berbasis pengalaman, siswa tidak hanya memahami konsep toleransi secara teoritis, tetapi juga menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian Su'udiyah (2020) menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar PPKN berbasis ilmu hukum tentang penistaan agama efektif dalam menumbuhkan civic disposition siswa. Keabsahan penelitian diperkuat dengan triangulasi metode melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, nilai moral toleransi ditanamkan melalui keteladanan guru, seperti pesan moral sebelum masuk kelas tentang perilaku baik dan buruk. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang kritis, toleran, dan rasional dalam menyikapi isu penistaan agama.

Dengan demikian, penanganan isu penistaan agama membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, pendidikan, serta penguatan nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan PPKN menjadi salah satu instrumen utama untuk membangun kohesi sosial, memperkuat demokrasi, dan mencetak warga negara yang mampu menghadapi isu-isu sensitif dengan cara yang bijak dan konstruktif.

## DAFTAR PUSTAKA

2025

60. <https://doi.org/10.37364/jireh.v7i1.427>.

Aryani, Nini, dan Nopa Wilyanita. "Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Terintegrasi Pembelajaran untuk Menanamkan Nilai-nilai Toleransi Sejak Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 5 (2022): 4653-60. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2339>.

Aswidar, Rika, dan Siti Zahara Saragih. "Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama." *Jurnal Imiah Pendidikan dan Pembelajaran* 6, no. 1 (2022): 134. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43373>.

Evi Nur Khofifah dan Siti Mufarochah. "Penanaman Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini Melalui Pembiasaan Dan Keteladanan." *At-Thufuky : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2022): 60-65. <https://doi.org/10.37812/atthufuky.v2i2.579>.

Ibnu Ansori, Lie Epifani Rahmaad Gunadi. Penguatan Karakter Pancasila Untuk Berfikir-Kritis Mahasiswa Ppkn. 4 Oktober 2023.

Irwansyah, Rio, dan Fitriani Fitriani. "Analisis Kasus Penistaan Agama dalam Perspektif Forum Umat Islam Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 7, no. 1 (2025): 350-

Izad, Rohmatul. "Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016)." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 171. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0101-10>.

lukman Nusa. Media Sosial Dan Kerukunan Umat Beragama Terkait Gerakan Aksi Damai Terkait Isu Penistaan Agama Di Media Sosial Dan Dampaknya Pada Kerukunan Umat

- Beragama. Vol. 11, No. 1, Maret 2020 (t.t.).
- Nurhasanah, Enung, Siti Aisah, dan Mulya Yusnarti. "Peran Guru Sekolah Dasar dalam Pembentukan Karakter Siswa." *Jurnal Evaluasi dan Kajian Strategis Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (2024): 21–26. <https://doi.org/10.54371/jekas.v1i1.325>.
- Pahmi, Sahrul, Abd Majid, dan Muhammad Idris. "Analisis Framing Pemberitaan Media Online Republika dan Detik.com dalam Isu Penistaan Agama Panji Gumilang Pimpinan Pesantren Ma'hadAl-Zaytun." *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 4, no. 2 (2024): 37–44. <https://doi.org/10.33096/respon.v4i2.230>.
- Purba, Klarissa Theodora Br., Monalisa Marta Siahaan, Lukman Pardede, Hotmaida Simanjuntak, dan Kondios Pasaribu. "Peran Pendidik Mata Pelajaran PPKN Dalam Membentuk Sikap Toleransi Dan Kepedulian Sosial Siswa Di Kelas VII." *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 3, no. 3 (2025): 433–46. <https://doi.org/10.58540/pijar.v3i3.1093>.
- Putri, Aminta, Toni Toni, dan Rohana Rohana. "Penerapan Karakter Toleransi Terhadap Siswa Melalui Pelajaran Ppkn Di Sekolah." *Research and Development Journal of Education* 10, no. 2 (2024): 910. <https://doi.org/10.30998/rdje.v10i2.25115>.
- Ramadhani, Diana Ayu, dan Muhroji Muhroji. "Peran Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar pada Peserta Didik di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (2022): 4855–61. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2960>.
- Rivai, Immawati Nur Aisyah, dan Rivai Mana. "Penerapan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar: Membangun Karakter Toleransi Sejak Dini." *Vifada Journal of Education* 3, no. 1 (2025): 30–37. <https://doi.org/10.70184/hxj60t85>.
- Romi Dian Sari, Melisa. Peran Guru Ppkn Dalam Membentuk Karakter Anti Bullying. 1 Juni 2025. [file:///C:/Users/IdeaPad/Downloads/Peran Guru Ppkn Daalam Membentuk Karakter Siswa An ti Bullying.pdf](file:///C:/Users/IdeaPad/Downloads/Peran%20Guru%20Ppkn%20Daalam%20Membentuk%20Karakter%20Siswa%20An%20ti%20Bullying.pdf).
- Saputra, Singgih, Catur Putra Subekti, dan Vitara Dewi Nazarina. "Menanggulangi Kebencian dan Ekstrimisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan untuk Generasi Toleran." *Humainirum* 2, no. 2 (2024): 12–16. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i2.50>.
- Siti Yummah. Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Multikultural Untuk Membentuk Karakter Toleransi. Vol. 2 No. 1 (2020): January : Mudir: *Jurnal Manajemen Pendidikan* (Januari 2020).
- Sukmayadi, Trisna, Mahmuda Maarif, Hermalia Rosalina Fitri, Ainun Karunia Dewi, Yulia Gesti Merkuri, dan Ani Nur Haryanti. "Membangun Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa melalui Literasi Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan." *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran* 12, no. 2 (2024): 245–56. <https://doi.org/10.24269/dpp.v12i2.9388>.
- Syamzaimar. Pendidikan Kewarganegaraan, Implemetasi Pengamalan Islam. PI. Indragiri Dot Com, t.t.
- Ulfah Du'udiyah. Pengembangan Bahan Ajar Ppkn Berbasis Ilmu Hukum Tentang Penistaan Agama Dalam Menumbuhkan Civic Desposotion Siswa. 9 April 2020.
- Vivi, Tamaeka. Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Melalui Penddidikan Karakter Di Sekolah Dasar. 2022. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/18231>.
- Wijaya, Toni, Kodrattulloh Sidiq Khusnan, Lukman Habibul Umam, dan Ema Puspitasari. "Internalisasi Kesadaran Kritis Siswa melalui Pembelajaran Sejarah Peradaban Islam dalam Menanggapi Fenomena Intoleransi: Studi Kualitatif pada Siswa Kelas IX MTs Wali Songo Sukajadi, Lampung Tengah." *Nuris Journal of Education and Islamic Studies* 4, no. 2 (2024): 166–74. <https://doi.org/10.52620/jeis.v4i2.139>.
- Yuhana, Asep Nanang, dan Fadlilah Aisah Aminy. "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2020): 79.

<https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>.

Yuliani, Dinar, Putri Nur Isnaini, Syifaun Nafisah, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furnamasari. "Implementasi Nilai Karakter Toleransi dalam Pembelajaran PKn di SDN Baranangsiang." *Aulad: Journal on Early Childhood* 4, no. 3 (2021): 137-42. <https://doi.org/10.31004/aulad.v4i3.183>.